

Efek Kualitas Auditor terhadap Tata Kelola dan Hak Pemegang Saham Publik

I Putu Gede Ary Suta
Firmanzah

Abstract

Auditor is not only as an institution whose function is to conduct audit activities. The auditor has more important role than merely investigate, document checking and make a report of financial situation. One of the aspects of auditor as an institution is auditor quality. We assume that auditor's quality play more strategic role than produce best financial analysis and report. Our data and hypothesis test show that auditor's quality can enhance information disclosure as well as its contribution to improve the quality of good-corporate-governance (GCG) policy and its implementation. Finally, GCG boost the shareholder's right to access financial information. This study suggest that in order to access reliable information, government body or shareholders should request company to auditor who has good reputation and image to realize audit activities.

Keywords: Tata kelola perusahaan, auditor

Dewasa ini peran auditor telah menjadi pusat kajian dan riset dikalangan akademisi. Tidak hanya itu, para praktisi juga semakin kritis dengan selalu menganalisa kontribusi apa yang diberikan oleh auditor. Peran auditor untuk meningkatkan kredibilitas dan reputasi perusahaan sangatlah besar (Kinney, 1975a). Selain itu juga, beberapa peneliti seperti Peursem (2005) melihat bahwa auditor memainkan peranan penting dalam jaringan informasi di suatu perusahaan. Auditor berperan dalam mengumpulkan, menganalisa dan men-distribusikan informasi keuangan perusahaan. Laporan audit dan analisa keuangan hasil auditor dapat digunakan sebagai pendukung manajemen (*supporting management*)

dan aktivitas perusahaan. Sejalan dengan pendapat tersebut, Gjesdal (1981) melihat bahwa peranan utama auditor adalah menyediakan informasi yang berguna untuk keperluan penyusunan kontrak yang dilakukan oleh pemilik atau manajer perusahaan.

Auditor juga diharapkan dapat berperan dalam proses pengembangan sistem yang menjamin pentingnya proses audit dan kontrol (Rittenberg & Purdy, 1978). Proses ini sangat penting ketika kita ingin mendesain sistem informasi baru berdasarkan jaringan komputer. Perusahaan membutuhkan proses kontrol dan evaluasi tentang semua hal dan aktivitas yang dilaksanakan. Apakah aktivitas tersebut sudah sesuai dengan petunjuk dan panduan atau tidak, menjadi pusat perhatian dalam aktivitas audit. Selain itu juga, perencanaan membutuhkan adaptasi. Aktivitas audit dapat mendeteksi sedini mungkin kemungkinan atau penyimpangan dari perencanaan yang telah dilakukan. Sehingga aktivitas penyesuaian dapat dilakukan secepat mungkin.

Auditor tidak hanya sebagai tukang stempel perusahaan (Woodlock & Claypool, 2001), namun perannya akhir-akhir ini menjadi sangat strategis. Bahkan peran auditor telah keluar dari peran-peran tradisional seperti: (1) analisa tentang apakah standar atau kontrol yang ada telah mampu untuk meminimasi resiko atau tidak, (2) apakah standar yang berlaku sekarang cukup, sesuai dan murah atau tidak, (3) apakah standar dan kontrol telah sesuai dengan apa yang diharapkan pihak manajemen atau tidak, (4) apakah masukan yang konstruktif dapat dilakukan atau tidak. Peranan auditor dewasa ini sampai juga melihat kelayakan perusahaan melalui apakah aktivitas yang dilakukan telah sesuai dengan 'best-practice' yang telah ditetapkan atau tidak.

Peranan dan jasa auditor tidak dapat dilepaskan dari kualitas informasi yang dihasilkan (DeAngelo, 1981b; Schauer, 2002). Selain itu juga auditor juga dihadapkan pada kenyataan bahwa terdapat perbedaan biaya-agen (*agency cost*) dari klien yang dihadapi (Watts & Zimmerman, 1986). DeFond *et al.*, (2000) berargumen bahwa terdapat banyak hal yang dapat mempengaruhi kualitas audit. Satu diantaranya adalah spesialisasi aktivitas audit dalam suatu sektor industri tertentu. Spesialisasi menghasilkan kualitas audit dibandingkan dengan non-spesialis (Krishnan & Yang, 1999; Craswell *et al.*, 1995).

Kualitas audit sangat ditentukan oleh kompetensi dan kebebasan (*independence*) dari auditor (DeAngelo, 1981a; Antle, 1984). Dengan memiliki derajat kebebasan yang tinggi maka auditor menjadi tidak tergantung kepada perusahaan atau entitas dimana analisa akan dilakukan. Ketergantungan mengurangi alternatif pilihan. Sehingga auditor tidak dapat dengan bebas untuk menilai dan mengevaluasi kinerja dan kondisi keuangan perusahaan tersebut. Hal yang paling penting adalah

Dr. I Putu Gede Ary Suta,
Staf Pengajar Magister-Management
FEUI (Staf Pengajar Pasca Sarjana Ilmu
Manajemen FEUI)

Firmanzah, PhD
Departemen Manajemen FEUI

bagaimana untuk menghindari kolusi antara auditor dengan perusahaan yang diaudit (Baiman *et al.*, 1991). Hal tersebut dapat dihindari melalui memperjelas kontrak kerja yang berisikan aturan main dan petunjuk yang harus dilakukan baik oleh auditor ataupun perusahaan yang akan di audit.

Namun, masih tidak banyak penelitian yang melihat kaitan antara kualitas auditor dengan tata kelola perusahaan (*corporate-governance*). Dalam penelitian ini, kami melihat bahwa peranan auditor lebih strategi daripada peran yang selama ini kita bayangkan sebelumnya. Selain itu juga, kita sepekat dengan Chang (2000), bahwa audit harus mampu menjamin kepentingan para stakeholder perusahaan. Aktivitas audit harus mampu menghasilkan informasi tentang kondisi sebenarnya yang terdapat dalam suatu perusahaan. Dimana informasi tersebut akan digunakan oleh banyak pihak yang terkait dengan perusahaan untuk mengambil keputusan. Kualitas auditor merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam hal ini. Kualitas informasi yang disediakan untuk keperluan sistem tata kelola kota sangat dipengaruhi oleh kualitas auditor. Untuk menguji keterkaitan ini maka kita menyebarkan kuisioner kepada CEO perusahaan-perusahaan yang listing dalam Jakarta Stock Exchange.

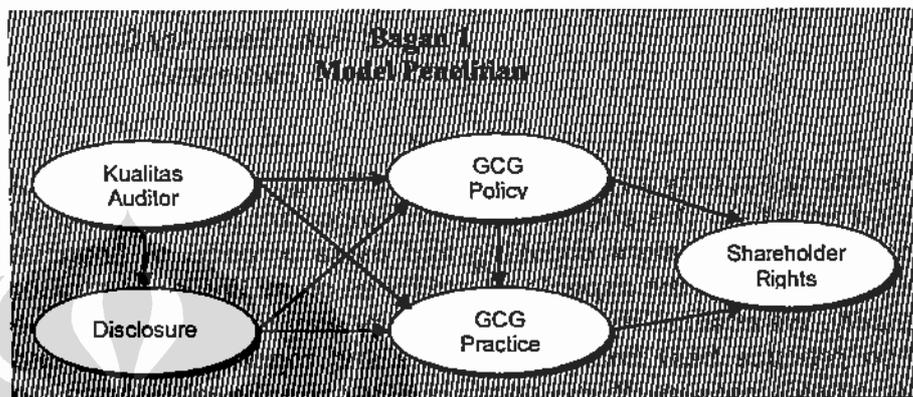
Model dan Hipotesa

Kualitas auditor dipercaya tidak hanya berpengaruh terhadap kualitas audit yang dilakukan, namun lebih dari itu, efek kualitas auditor lebih strategis dari sekedar atas pemahaman tentang kualitas auditor. Pertama, kualitas auditor dilihat sebagai dimensi obyektif dan berdasarkan pengukuran obyektif atas hasil pekerjaan dan reputasi yang telah dibangun. Kedua, kualitas auditor dapat terjadi dilihat sebagai image yang dipersepsikan oleh pengguna terhadap reputasi dan kredibilitas yang selama ini dibangun. Kedua dimensi tentang kualitas auditor ini dipercaya dapat mempengaruhi kualitas aktivitas audit yang dilakukan. Dimana semakin baik kualitas audit, maka kontribusi dari hasil audit terhadap perusahaan juga semakin baik.

Auditor yang berkualitas baik akan menghasilkan informasi yang dapat

dipercaya, akurat dan mencerminkan realitas perusahaan yang bersangkutan. Auditor yang memiliki kualitas yang baik akan selalu menjaga kualitas audit yang dilakukannya. Sehingga dalam melakukan

baik. Sementara itu, sistem tata kelola perusahaan yang baik akan dapat menjamin hak-hak dari para pemegang saham. Model umum dalam penelitian ini dapat dilihat dalam bagan 1.



audit mereka akan selalu mengikuti standar audit dan pelaporan yang telah ditetapkan. Ketika laporan keuangan yang dihasilkan tidak obyektif dan kolusif (Baiman *et al.*, 1991), maka hal tersebut tidak hanya membahayakan perusahaan yang diaudit, tetapi juga reputasi auditor dan para investor. Hal ini terlihat pada kasus kejatuhan perusahaan energi terbesar di dunia, pada saat itu, yaitu Enron. Faktor penyebab kebangkrutan perusahaan tersebut adalah kesalahan fatal, penipuan sistematis, dalam sistem akuntan mereka. Auditor independen Andersen (yang dulunya Arthur Andersen) ikut menyusun pembukuan 'kreatif' Enron. Selain itu juga, kasus tersebut membuat kantor akuntansi Arthur Andersen dibubarkan. Belajar dari kasus tersebut, maka menjaga kualitas audit sebenarnya tidak hanya berguna bagi auditor, tetapi juga bagi perusahaan yang diaudit dan para pemegang saham yang akan berinvestasi.

Dalam penelitian ini, kami akan mengukur efek dari kualitas auditor terhadap informasi, tata kelola perusahaan dan hak pemegang saham. Seperti yang diutarakan diatas, bahwa peranan audit tidak hanya terbatas pada kualitas laporan dan analisa keuangan perusahaan saja. Laporan ini nantinya merupakan input yang sangat berguna dalam disain sistem tata kelola perusahaan. Dengan adanya informasi yang akurat dan terpercaya maka sistem pengendalian dan kontrol manajemen akan dapat dilakukan dengan

Dalam bagan diatas terlihat bahwa dengan adanya kualitas auditor yang baik, maka hal tersebut akan menjamin disclosure dari informasi. Terdapat kecenderungan dalam setiap perusahaan untuk membuka informasi tentang kondisi keuangan mereka sedikit mungkin (Kim, 1993). Menggunakan auditor yang memiliki kualitas yang baik dapat dilihat sebagai itikad baik dari perusahaan untuk menampilkan informasi yang akurat dan terpercaya. Perusahaan sangat memahami bahwa auditor yang berkualitas akan mencoba untuk berpegang teguh pada prinsip dan standar disclosure. Sehingga perusahaan tersebut sangat mengetahui konsekwensi ketika ia menggunakan auditor yang memiliki kredibilitas yang tinggi. Kredibilitas yang tinggi dalam hal ini dapat mengurangi potensi kolusif dalam pelaporan hasil audit yang dilakukan. Karena auditor akan berusaha menjaga nama baik mereka. Selain itu juga, kualitas auditor juga dibutuhkan oleh publik untuk menjamin bahwa informasi dan analisa keuangan benar-benar telah dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan atau tidak.

Kualitas auditor yang baik tidak hanya berpengaruh secara positif terhadap disclosure, melainkan juga informasi yang terpercaya akan memudahkan baik dalam penyusunan dan implementasi sistem tata kelola perusahaan (*good-corporate-governance*). Menurut Siebens (2002), tata kelola perusahaan adalah pengetahuan

dan seni untuk menyeimbangkan pembagian kepentingan dari semua stakeholder dan membuat pilihan diantara beragam opsi dengan dukungan segala jenis informasi untuk menjadi perusahaan yang bertanggung jawab. Masalah tata kelola perusahaan ini menarik perhatian karena salah satu sumber utama krisis moneter yang terjadi di beberapa Negara Asia pada tahun 1997 adalah kelemahan dalam tata kelola perusahaan (Suta & Musa, 2004). Bahkan, di Inggris pada akhir dasawarsa 1980-an, masalah tersebut menarik perhatian publik sebagai akibat dari publikasi berbagai masalah korporat yang menyangkut tata kelola perusahaan (Keasey & Wright, 1997). Dari kejadian tersebut dapat dikatakan bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan yang tidak baik akan mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan dan pada akhirnya akan berpengaruh pada reputasi perusahaan sebagai agen ekonomi yang bertanggung jawab. Dengan menggunakan auditor yang memiliki reputasi yang baik, maka hal tersebut memudahkan dalam penyusunan dan implementasi dari sistem tata kelola yang baik. Karena sistem tata kelola perusahaan didasarkan pada informasi yang akurat dan mencerminkan realitas perusahaan. Dengan informasi yang baik, maka keputusan yang akan diambil akan juga mencerminkan kondisi riil perusahaan. Dengan kata lain hal ini akan mengurangi deviasi dan penyimpangan dari kondisi riil perusahaan.

Menggunakan informasi dan analisa keuangan yang baik juga sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang ditetapkan oleh OECD (1999). Tata kelola yang baik perlu memperhatikan cara pengaturan korporasi dalam hal pengarahan dan pengendalian untuk meningkatkan kemakmuran bisnis secara *accountable* untuk mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tidak mengabaikan kepentingan stakeholder lainnya. Selain itu juga, perlu diperhatikan adalah kejelasan fungsi, hak, kewajiban, dan tanggung jawab diantara pihak-pihak yang berkepentingan dengan korporasi. Untuk melakukan hal ini maka perlu diperhatikan adalah proses pengendalian internal dan eksternal yang efektif serta penciptaan keseimbangan internal diantara organ perusahaan dan keseimbangan

eksternal diantara para stakeholder. Sehingga perusahaan dituntut untuk mampu menjaga prinsip-prinsip seperti keadilan (*fairness*), transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), dan pertanggungjawaban (*responsibility*).

Keadilan berkaitan dengan perlindungan terhadap seluruh kepentingan pemegang saham secara merata, termasuk pemegang saham minoritas. Perlindungan kepentingan pemegang saham dimaksudkan untuk mencegah kemungkinan terjadinya praktek korporasi yang merugikan seperti *fraud*, dilusi, *manajerial or controlling shareholder self-dealing*, dan *insider trading*. Transparansi merupakan pengungkapan informasi kinerja korporasi secara akurat, tepat waktu, jelas, konsisten, dan dapat dibandingkan. Selain itu sistem akuntansi perusahaan juga harus menggunakan standar-standar akuntansi serta audit yang lazim dan diterima secara luas. Akuntabilitas manajemen dilakukan melalui pengendalian yang efektif berdasarkan kejelasan fungsi, hak, kewajiban, wewenang, dan tanggung jawab antara pemegang saham, pengurus, pengawas, dan auditor. Pertanggungjawaban berkenaan dengan korporasi sebagai agen ekonomi yang harus selalu patuh terhadap hukum dan peraturan yang berlaku dalam bidang perpajakan, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup, kesehatan dan keselamatan kerja, standard penggajian, persaingan yang sehat dan sebagainya.

Aktivitas diatas jelas akan berkontribusi positif terhadap hak-hak para pemegang saham. Pemegang saham tidak hanya membutuhkan informasi yang akurat dan obyektif terhadap kondisi riil perusahaan, namun lebih dari itu pemegang saham juga menuntut kemudahan akses informasi tersebut. Dengan menggunakan kualitas auditor yang terpercaya, maka auditor tersebut akan membawa informasi dan analisa keuangan kepada publik. Sekaligus mempermudah akses informasi para pemegang saham terhadap informasi perusahaan dimana mereka berinvestasi. Hambatan terhadap penyediaan dan akses informasi ini akan dapat memunculkan ketidakpuasan dan kekecewaan pemegang saham terhadap perusahaan dimana mereka berinvestasi.

Dan ketika hal ini terus berlanjut akan dapat mempengaruhi secara negatif investasi pemegang saham dalam perusahaan tersebut. Dengan kata lain, pemegang saham akan mengalihkan investasi mereka ke perusahaan dimana mereka merasa nyaman dengan investasi yang mereka lakukan. Ketidaktepatan informasi akan meningkatkan ketidakpastian dan resiko investasi. Hal ini membuat investor enggan untuk melakukan investasi.

Data dan Metode Penelitian

Data penelitian diperoleh melalui kusioner yang dibagikan kepada CEO perusahaan yang tercatat dalam Jakarta Stock Exchange. Dari 65 kusioner yang dibagikan, hanya 60 kusioner yang dapat diolah untuk menganalisa hipotesa yang diajukan. Secara keseluruhan, sampel penelitian terdiri dari 44 perusahaan publik yang masuk dalam daftar LQ 45 periode bulan Februari 2004 sampai dengan bulan Juli 2004. Sementara sisanya, yaitu 16 perusahaan publik yang pernah masuk ke dalam daftar LQ 45 pada periode sebelumnya. Jenis usaha perusahaan yang diteliti paling banyak berasal dari industri perdagangan (32 perusahaan), sektor jasa dan investasi (16 perusahaan) dan dari sektor pertanian (2 perusahaan).

Untuk mengetes hipotesa-hipotesa yang telah dipaparkan diatas, peneliti menggunakan analisa structural (Structural Equation Modelling—SEM). Terdapat beberapa teknik dan metode yang dapat digunakan dalam analisa SEM, dimana kebanyakan dari teknik perhitungan tersebut menggunakan 'adjustment covariance'. Akhir-akhir ini terdapat alternatif teknik, meskipun lebih jarang digunakan, namun semakin lama semakin banyak pihak yang menggunakannya. Teknik ini dikenal sebagai Partial Least Square (PLS), dimana analisa ini diyakini dapat menjadi teknik analisa struktural yang akurat (Chin *et al.*, 1996).

Metode PLS dapat digunakan secara baik ketika satu atau lebih dari karakteristik berikut ini terpenuhi : (1) model penelitian meliputi konstruksi formatif (*formative construction*), (2) jumlah sampel relatif kecil, dan (3) asumsi normalitas data tidak terpenuhi (Chin & Newstead, 1999). Terdapat beberapa software yang dapat digunakan untuk menganalisa model

struktural PLS, dalam penelitian ini kami akan menggunakan SmartPLS versi 2.0. Software ini kami gunakan untuk menganalisa dan mengetest hipotesa dan kualitas model yang kami ajukan. PLS merupakan teknik analisa yang berbasis pada teknik regresi berdasarkan 'path analysis'. Analisa ini memungkinkan mengestimasi dan mengkalkulasi hubungan antar 'construct'. PLS menghasilkan nilai muatan (*loading*) diantara item dan *construct* dan sekaligus menghitung koefisien terstandar (*standardized coefficient*) dalam bentuk koefisien beta dari setiap hubungan. Hasil analisa dari SmartPLS digunakan untuk melihat dan menganalisa kualitas model pengukuran (*measurement model*) dan kemudian menguji kesesuaian (*fit*) dan kualitas model struktural.

Model Pengukuran

Secara garis besar, analisa model terdiri dari empat analisa; (1) reliabilitas individual (*individual reliability*), (2) composite reliability, (3) convergent validity, dan (4) discriminative validity (Chin, 1998a, 1998b; Fornell & Larcker, 1981; Hulland, 1999). Individual reliability dari masing-masing item pertanyaan dievaluasi melalui skor muatan (*loading*) atau korelasi dari indikator dalam suatu *construct*. Hasil analisa individual reliability dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 1. Seperti yang terlihat dalam table tersebut, semua nilai individual reliability lebih besar dari 0.55 seperti yang dianjurkan oleh Falk dan Miller (1992). Sementara itu, composite reliability digunakan untuk melihat reliabilitas dari *construct*. Analisa ini dilihat sebagai analisa yang lebih menarik dan akurat dibandingkan dengan menggunakan Alpha Cronbach— \pm (Fornell & Larcker, 1981). Dalam Tabel 1, kita bisa melihat bahwa semua nilai *construct* melebihi 0.7 dan bahkan lebih tinggi dari 0.8 (Nunnally, 1978). Pengukuran *convergent validity* dilakukan dengan menggunakan pengukuran yang dikembangkan oleh Fornell dan Larcker (1981) yang lebih dikenal sebagai Average-Variance-Extracted (AVE). Analisa ini mensyaratkan nilai yang lebih besar dari 0.50 yang menunjukkan bahwa lebih dari 50% dari varians dari *construct* dijelaskan oleh indikator-indikator yang menyusunnya.

Seperti yang terlihat juga dalam Tabel 1, semua nilai AVE melebihi 0.50.

Sementara itu, untuk menilai discriminant validity, Fornell dan Larcker (1981) menganjurkan untuk membandingkan nilai AVE dari masing-masing *construct* dengan hubungan varians masing-masing *construct* dengan *construct* yang lain. Sehingga, discriminant validity akan dianalisa menggunakan matriks korelasi variable. Matriks ini membandingkan akar dari nilai AVE dengan korelasi diantara variabel. Untuk mendapatkan *discriminant validity* dari suatu *construct*, nilai akar dari AVE (nilai yang terdapat dalam garis diagonal) harus lebih besar dari nilai korelasi dari masing-masing *construct* dengan *construct* yang lain. Untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, nilai diagonal harus lebih besar dari nilai non-diagonal. Dalam Tabel 2, terlihat bahwa nilai diagonal semuanya melebihi nilai non-diagonal. Dengan kata lain, discriminant validity dari data yang akan digunakan dalam analisa struktural adalah memuaskan.

Kesesuaian (*fit*) Model Struktural

Evaluasi dan penilaian model structural menggunakan kekuatan prediktif (*predictive power*) dari variable laten dependen. Dimana pengukuran ini dilakukan dengan melihat koefisien determinasi (R^2) yang harus sama atau lebih besar dari 0.1 (Falk & Miller, 1992). Dalam Bagan 4 terlihat bahwa nilai R^2 dari disclosure ($R^2=0.27$), kebijakan corporate governance ($R^2=0.56$), praktek corporate governance ($R^2=0.80$), dan hak pemegang saham ($R^2=0.57$) kesemuanya lebih besar dari 0.1. Kemudian, signifikansi dari koefisien β dianalisa dengan menggunakan nilai *t* yang didapat menggunakan teknik bootstrap non-parametric, seperti yang dianjurkan oleh Chin (1998a). Analisa ini dilakukan untuk mengevaluasi keakuratan dan stabilitas perhitungan, sehingga perlu menggunakan teknik bootstrap non-parametrik (Chin, 1998b). Analisa ini dilakukan dengan menggunakan uji *t* dan 59 degree of freedom untuk mengukur signifikansi dari koefisien β mendapatkan nilai $t(0,001;59) = 3,463$. Kemudian, nilai

Tabel 1
Nilai Reliabilitas dan Average-Convergent-Validity (AVE)

| | | | | | | |
|---|------|------|------|--------|--|--|
| 1. Kualitas audit internal | 4.73 | 0.71 | 0.69 | 8.962 | | |
| 2. Kualitas Komite audit | 4.56 | 0.75 | 0.88 | 13.748 | | |
| 3. Kualitas audit eksternal | 4.78 | 0.72 | 0.79 | 10.486 | | |
| 4. Kualitas anggota Komite audit Independen | 4.53 | 0.81 | 0.84 | 10.787 | | |
| 5. Frekwensi pertemuan Komite audit Independen | 3.97 | 0.69 | 0.65 | 5.831 | | |
| 1. Pentingnya menerbitkan laporan keuangan dan analisa manajemen | 5.28 | 0.84 | 0.92 | 22.142 | | |
| 2. Ketepatan waktu menerbitkan laporan keuangan dan analisa manajemen | 5.32 | 0.57 | 0.92 | 20.914 | | |
| 3. Kelengkapan laporan keuangan | 5.30 | 0.85 | 0.82 | 14.348 | | |
| 1. Pedoman tertulis tentang corporate governance | 4.87 | 0.75 | 0.90 | 18.842 | | |
| 2. Pedoman tertulis tentang code of conduct | 4.92 | 0.74 | 0.90 | 18.917 | | |
| 3. Respons untuk kemudahan mendapatkan informasi | 5.13 | 0.68 | 0.78 | 15.828 | | |
| 4. Pedoman kewenangan komisaris | 4.93 | 0.71 | 0.85 | 18.183 | | |
| 5. Kelengkapan dokumen pedoman | 4.30 | 0.89 | 0.65 | 9.725 | | |
| 1. Kejelasan pemisahan wewenang komisaris dan direksi | 5.15 | 0.71 | 0.79 | 13.194 | | |
| 2. Peran komite audit dan komite khusus lainnya | 4.33 | 0.88 | 0.78 | 17.222 | | |
| 3. Pemantauan dan evaluasi pencapaian target | 5.37 | 0.58 | 0.72 | 18.089 | | |
| 4. Peran komisaris dalam evaluasi kinerja direksi | 4.52 | 0.77 | 0.78 | 14.448 | | |
| 1. Perlindungan bagi seluruh pemegang saham | 5.35 | 0.63 | 0.80 | 9.479 | | |
| 2. Perlindungan terhadap pemegang saham minoritas | 5.23 | 0.74 | 0.77 | 7.607 | | |
| 3. Dorongan pemegang saham untuk hadir RUPS | 4.77 | 0.87 | 0.57 | 5.784 | | |
| 4. Akurasi informasi bagi pemegang saham | 5.37 | 0.81 | 0.87 | 11.567 | | |
| 5. Kecukupan waktu untuk menelaah laporan keuangan | 5.00 | 0.76 | 0.85 | 11.748 | | |

Table 2 The latent variable correlation matrix: discriminant validity

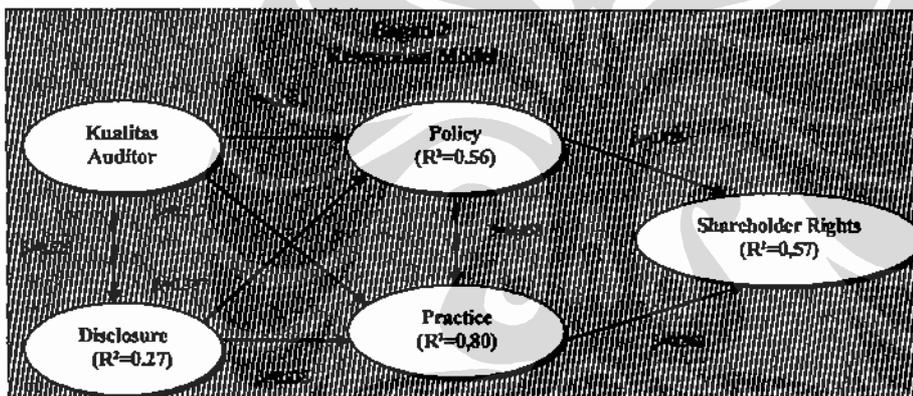
| | Kualitas Auditor | Disclosure | Cor. Gov. Policy | Cor. Gov. Practice | Shareholder Rights |
|--------------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Kualitas Auditor | 0.77 ^a | | | | |
| Disclosure | 0.52 | 0.89 | | | |
| Cor. Gov. Policy | 0.60 | 0.69 | 0.85 | | |
| Cor. Gov. Practice | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.77 | |
| Shareholder Right | 0.51 | 0.70 | 0.72 | 0.71 | 0.78 |

^a The principal diagonal elements correspond to the square root of AVE of each construct; the other figures correspond to the correlations between the constructs

Table 2 The latent variable correlation matrix: discriminant validity

| | Kualitas Auditor | Disclosure | Cor. Gov. Policy | Cor. Gov. Practice | Shareholder Rights |
|--------------------|-------------------|------------|------------------|--------------------|--------------------|
| Kualitas Auditor | 0.77 ^a | | | | |
| Disclosure | 0.52 | 0.89 | | | |
| Cor. Gov. Policy | 0.60 | 0.69 | 0.85 | | |
| Cor. Gov. Practice | 0.74 | 0.73 | 0.71 | 0.77 | |
| Shareholder Right | 0.51 | 0.70 | 0.72 | 0.71 | 0.78 |

^a The principal diagonal elements correspond to the square root of AVE of each construct; the other figures correspond to the correlations between the constructs



koefisien dari hubungan dua construct dapat dikatakan signifikan apabila nilainya lebih besar dari 0.2 dan lebih ideal lagi apabila nilainya lebih besar dari 0.3 (Chin, 1998b). Nilai uji t dan koefisien dalam penelitian ini dapat dilihat dalam Tabel 3 dan Bagan 2 dibawah ini:

Semua hipotesa yang mencoba menjelaskan hubungan antara kualitas auditor, disclosure informasi, kebijakan dan implementasi tata kelola perusahaan dan hak informasi pegemang saham diterima oleh data penelitian. Dengan melihat varians dari variabel yang ingin dijelaskan (R^2), model penelitian memiliki 'predictive power'. Karena nilai R^2 dari semua variabel yang ingin dijelaskan lebih besar dari 0.1, sesuai dengan standar yang disyaratkan oleh Falk da Miller (1992). Dengan melihat koefisien terstandar (coefficient standardized) (β) dan nilai t-test, kita dapat menganalisa

bahwa terhadap hubungan kausaliti yang kuat antara kualitas auditor dengan disclosure informasi ($\beta = 0.523$; t value = 7.650). Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya kualitas auditor yang tinggi maka disclosure informasi keuangan perusahaan-pun akan semakin tinggi. Dengan kata lain, publik dapat menilai apakah disclosure informasi tinggi atau tidak berdasarkan siapa yang melakukan audit tersebut. Sementara itu, kualitas auditor juga berpengaruh positif baik terhadap kebijakan sistem tata kelola perusahaan ($\beta = 0.331$; t value = 4.161) maupun dengan implementasinya ($\beta = 0.517$; t value = 7.306). Hasil ini juga menunjukkan bahwa menggunakan auditor yang berkualitas akan memberikan dampak yang positif terhadap penyusunan sistem tata kelola perusahaan. Hal ini dikarenakan kualitas dari kebijakan sangat ditentukan dari

kualitas informasi yang digunakan dalam menyusun kebijakan tersebut. Selain itu juga, informasi yang dihasilkan oleh auditor juga meningkatkan implementasi dari sistem tata kelola perusahaan. Karena informasi yang akurat akan lebih mencerminkan realitas dan mengurangi deviasi terhadap apa yang terdapat di lapangan. Sehingga implementasi tata kelola akan sesuai dengan yang terdapat di lapangan.

Selain itu juga, dalam test hipotesa terlihat bahwa disclosure informasi juga berpengaruh secara positif dan signifikan baik terhadap penyusunan kebijakan sistem tata kelola perusahaan ($\beta = 0.337$; t value = 4.671) dan juga implementasinya ($\beta = 0.238$; t value = 3.189). Melihat hasil ini, maka kita tidak dapat menyusun sistem tata kelola perusahaan yang baik tanpa didukung oleh informasi yang tepat dan akurat. Semakin besar informasi yang disembunyikan maka semakin besar pula deviasi sistem tata kelola yang akan dihasilkan. Selain itu juga, sistem yang dihasilkan menjadi tidak sesuai dengan kenyataan. Selain itu juga, konsistensi sistem tata kelola perusahaan dengan implementasinya juga menunjukkan hasil yang konsisten ($\beta = 0.458$; t value = 5.348). Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik penyusunan sistem tata kelola perusahaan maka akan semakin meningkatkan kualitas implementasinya. Pelaksanaan sistem pemisahan dan fungsi pemantauan dan kontrol akan menjadi optimal.

Hasil pengujian hipotesa juga menunjukkan bahwa baik kebijakan maupun implementasi dari sistem tata kelola perusahaan keduanya berpengaruh positif dan signifikan terhadap hak pemegang saham terhadap informasi tentang keuangan perusahaan. Pengaruh kebijakan sistem tata kelola perusahaan ditunjukkan dengan nilai koefisien $\beta = 0.426$ dan t value = 4.073. Sementara pengaruh implementasi tata kelola terhadap hak pemegang saham ditunjukkan dengan nilai koefisien sebesar $\beta = 0.362$ dan t value = 3.874. Hasil ini menunjukkan bahwa penyusunan dan penerapan sistem tata kelola perusahaan yang baik akan menyediakan informasi yang berguna bagi pemegang saham. Selain itu juga, akses informasi juga menjadi lebih mudah. Pemenuhan akses informasi yang cepat dan akurat sangat penting bagi pemegang saham

untuk mengurangi ketidakpastian dan risiko berinvestasi dalam perusahaan tersebut.

Diskusi dan Keterbatasan Penelitian

Dalam penelitian terlihat bahwa kualitas auditor memiliki efek yang tidak sederhana seperti yang kita bayangkan. Berdasarkan hasil uji hipotesa, maka kualitas auditor memiliki efek yang signifikan terhadap kualitas disclosure informasi dalam suatu perusahaan. Penjelasan dari hasil ini adalah auditor yang memiliki reputasi dan image yang bagus cenderung untuk memegang teguh prinsip dan standar laporan keuangan. Sehingga hal ini meningkatkan kualitas informasi, analisa dan laporan keuangan. Dimana informasi ini sangat penting, tidak hanya bagi konsumsi internal perusahaan terlebih lagi bagi pihak eksternal.

Hasil uji hipotesa lainnya juga menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan (*good-corporate-governance*) tidak dapat terjadi dengan sendirinya. Tata kelola perusahaan membutuhkan informasi yang akurat dan terpercaya dan juga mencerminkan kondisi riil perusahaan. Informasi yang berkualitas tidak akan didapat tanpa adanya institusi audit yang memiliki reputasi yang baik. Sehingga kualitas auditor, berdasarkan data yang kita peroleh, mempengaruhi secara signifikan kualitas kebijakan dan implementasi tata kelola perusahaan. Sementara itu, uji hipotesa berikutnya menunjukkan hubungan yang signifikan antara disclosure informasi dengan kualitas kebijakan dan implementasi tata kelola perusahaan. Dengan adanya informasi yang transparan membuat kebijakan tata kelola perusahaan menjadi lebih baik. Selain itu juga dengan adanya informasi yang transparan memperkecil kemungkinan ketidaksesuaian dengan realitas. Hasil lain menunjukkan kaitan antara kebijakan dan implementasi tata kelola perusahaan. Kita tidak akan mendapatkan kualitas implementasi tata kelola perusahaan tanpa adanya kualitas kebijakan yang baik.

Hak-hak pemegang saham tentang ketersediaan informasi yang akurat dan terpercaya tidak akan terwujud tanpa adanya sistem tata kelola perusahaan yang baik. Hasil uji hipotesa kami menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kebijakan dan

implementasi tata kelola perusahaan dengan hak pemegang saham akan ketersediaan dan akses informasi. Dengan kata lain, semakin bagus sistem tata kelola perusahaan maka memudahkan pemegang saham untuk mendapatkan informasi tentang investasi yang dilakukan.

Penelitian kami memiliki beberapa keterbatasan untuk menjelaskan efek dari kualitas auditor. Pertama, jumlah responden yang sangat sedikit. Semakin banyak data diharapkan analisa akan semakin merepresentasikan populasi. Kedua, analisa kami menggunakan data tentang pasar modal dan bisnis di Indonesia, namun kami tidak mengkaji dan menganalisa secara mendalam bagaimana mekanisme pasar modal di Indonesia. Ketiga, kami

tidak menganalisa secara komprehensif tentang bagaimana industri audit di Indonesia. Analisa dan kajian ini akan memberikan ilustrasi yang lebih lengkap dan bisa menjelaskan mengapa hubungan-hubungan signifikan seperti yang terlihat dalam uji hipotesa kami bisa terjadi. Kami mengharapkan bahwa penelitian berikutnya akan dapat melengkapi dan memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang efek kualitas auditor terhadap perusahaan publik di Indonesia. Mengingat penelitian dan kajian ilmiah tentang hal ini masih sangat sedikit. Sehingga kami mengundang berbagai kalangan baik akademisi maupun praktisi untuk dapat melakukan kajian tentang hal ini. **[J]**

Bibliografi

Anita, R. (1982). The auditor as an economic agent. *Journal of Accounting Research*, 20(2), 503-527.

Balmer, S.J., Evans, J.L.L., & Nandi, J.N. (1991). *Confusion in auditing*. *Journal of Accounting Research*, 29(1), 1-18.

Chang, S.Y. (2000). Keeping an eye on top management: why you need a comprehensive audit strategy. *Journal of Corporate Accounting & Finance*, 11(6), p. 41-48.

Chiu, W.W. (1988). Issues and options of structural equation modeling. *Management Information System Quarterly*, 12(2), p. 7-16.

Chiu, W.W. (1988). The partial least squares approach to structural equation modeling. In Marcoulides, G.A. (Ed). *Modern methods for business research*. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.

Chiu, W.W., & Newsted, P.F. (1999). Statistical strategies for small sample research. In Hoyt, R.L. (Ed). *Structural equation modeling*. London: Sage Publications.

Chiu, W.W., Marcom, B.L., & Newsted, P.F. (1998). A partial least square latent variable modeling approach for measuring interaction effects: results from a Monte Carlo simulation study and an organizational adoption study. In Degross, J., Lavanchak, S., & Srivastava, A. (Eds). *Proceedings of the 17th international conference on information system*. Cleveland, Ohio.

Creswell, A., Francis, J.R., & Taylor, S.L. (1995). Auditor brand name reputations and industry specializations. *Journal of Accounting and Economics*, 20, p. 297-322.

DeAngelo, L.E. (1981a). Auditor independence, contracting, and disclosure regulation. *Journal of Accounting and Economics*, 2, p. 113-127.

DeAngelo, L.E. (1981b). Auditor size and audit quality. *Journal of Accounting and Economics*, 3, p. 183-198.

DeFond, M.L., Francis, J.R., & Wong, T.J. (2000). Auditor industry specialization and market segmentation: evidence from Hong Kong. *Auditing: A Journal of Practice & Theory*, 19(1), p. 49-66.

Falk, R.F., & Miller, N.B. (1992). A primer for set modeling. Akron, Ohio: University of Akron.

Fornell, C., & Larcker, D.F. (1981). Evaluating structural equations models with unobservable variables and measurement error. *Journal of Marketing Research*, 18(1), p. 39-50.

Gleason, F. (1981). Accounting for stewardship. *Journal of Accounting Research*, p. 208-231.

Hulland, J. (1995). Use the partial least squares (PLS) in strategic management research: a review of four recent studies. *Strategic Management Journal*, 20(2), p. 195-204.

Keasey, K., & Wright, M. (1987). *Corporate governance, risk, responsibilities, and remuneration*. Chichester, U.K: John Wiley & Sons.

Qinman, J., & Yang, J.S. (1989). Auditor industry specialization and the sampling response coefficient. Working Paper, Temple University.

Kim, O. (1983). Disagreements among shareholders over a firm's disclosure policy. *Journal of Finance*, June, p. 747-760.

Kim, O. (1985). Disagreements among shareholders. *Journal of Finance*, 40(2), p. 747-760.

Kinney, W.R. Jr. (1975). Decision theory aspects of internal control system design, compliance and substantive test. *Journal of Accounting Research*, p. 14-29.

Kinney, W.R. Jr. (1978). A decision theory approach to the sampling problem in auditing. *Journal of Accounting Research*, p. 117-132.

Nunnally, J.C. (1978). *Psychometric theory*. New York: McGraw-Hill.

OECD (1998). *Principles of corporate governance*. France: Auditor.

Peureben, K.A.V. (2005). Conversation with internal auditors. *Managerial Auditing Journal*, 20(5), p. 483-512.

Rittenberg, L.E. & Purdy, C.R. (1978). The internal auditors' decision development. *MIS Quarterly*, 2, p. 47-57.

Schauer, F. (2002). The effects of industry specialization on audit quality: an examination using bid-ask spreads. *Journal of Accounting and Finance Research*, 21(1), p. 78-96.

Satens, A. (2002). Concepts and working instruments for corporate governance. *Journal of Business Ethics*, 39(1), p. 105-118.

Sula, J.F.G.A., & Mada, S. (2004). *Accounting banking*. Chikri, Jakarta: Yayasan Sad Sana Bhakti.

Watts, R.L., & Zimmerman, J.L. (1986). *Positive accounting theory*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.

Woodlock, P., & Gaypor, G. (2011). You and your controller: how to go from the end of the rubber stamp era. *Journal of Corporate Accounting & Finance*, 12(1), p. 27-38.